BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konflik perbatasan yang berawal dari ketidakjelasan batas-batas wilayah antara Thailand dan Kamboja pada peta yang dibuat berdasarkan pemerintahan Perancis dan pemerintahan Siam (Thailand) yaitu meliputi wilayah kuil Preah Vihear menghadapkan kedua Negara pada konflik perbatasan (BBC, 2013). Kuil Preah Vihear adalah wilayah yang diperebutkan oleh dua anggota dari Negara Association of Southeast Asia Nations (ASEAN) yaitu Thailand dan Kamboja. Letak kuil Preah Vihear ini di puncak penggunungan Dangrek dengan ketinggian 525 meter atau 657 meter di atas permukaan air laut, wilayah ini tepatnya terletak diantara wilayah perbatasan Kabupaten Kantharalak (Amphoe) Provinsi Si Sa Ket, timur laut Thailand dan Kabupaten Choam Khasant, Provinsi Preah Vihear, Utara Kamboja. Wilayah Preah Vihear merupakan wilayah yang memiliki banyak peninggalan sejarah berupa situs candi kuno hingga 228 candi (Cipto, 2007, p. 69).

Pada tahun 1953, setelah Kamboja meraih kemerdekaan, lalu Thailand memperkuat pembelaannya di perbatasan dekat kuil Preah Vihear dengan adanya pos polisi di Pegunungan Dangrek. Hal ini diprotes oleh pemerintah Kamboja di bawah Perdana Menteri Sihanouk. Beberapa negosiasi yang dilakukan dari tahun 1953 sampai 1958 tidak mencapai hasil yang positif. Karena itu, Kamboja memutuskan untuk mengirim kasus ini ke International Court of Justice (ICJ).

Proses penyelesaian dimulai dengan mendengarkan masing-masing pendapat dari kedua Negara. Berdasarkan penjelasan dari kedua Negara pada sidang ICJ tentunya kedua Negara tersebut berasumsi bahwa kuil Preah Vihear adalah bagian dari Negaranya. Selain mendengarkan masing-masing pendapat dari kedua Negara, putusan yang diambil ICJ berdasarkan sejarah dan fakta melalui perjanjian perbatasan yang dilakukan antara Kerajaan Siam dan Perancis pada tanggal 13 Februari 1904 mengenai cakupan ketentuan yang berkaitan dengan wilayah pegunungan Dangkrek Timur dimana kuil Preah Vihear berada. Ada beberapa pasal diantaranya (Tun, 2011, pp. 14-15) ;

> *Article 1:*
> The frontier between Siam and Cambodia starts, on the left shore of the Great Lake, from the mouth of the river Stung Roluos, it follows the parallel from that point in an easterly direction until it meets the river Prek Kompong Tiam, then, turning northwards, it merges with the meridian from that meeting point as far as the Pnom Dang Rek mountain chain. From there it follows the watershed between the basins of the Nam Sen and the Mekong, on the one hand, and the Nam Moun, on the other hand, and joins the Pnom Padang chain the crest of which it follows eastwards as far as the Mekong. Upstream from that point, the Mekong remains the frontier of the Kingdom of Siam, in accordance with Article 1 of the Treaty of 3 October 1893.
>
> *Article 3:*
>
> There shall be a delimitation of the frontiers between the Kingdom of Siam and the territories making up French Indo China. This delimitation will be carried out by Mixed Commissions composed of officers appointed by the two contracting countries. The work will relate to the frontier determined by Articles 1, and the region lying between the Great Lake and the sea.

Sesuai dengan artikel 1 dan 3 kedua belah pihak sepakat membentuk Komisi untuk memetakan garis-garis batas Negara di berbagai daerah, termasuk bagian timur dari jangkauan Dangrek. Komisi tersebut terdiri dari petugas Perancis dan Siam. Namun, petugas dari perwakilan Siam kurang memiliki kemampuan untuk melakukan pemetaan sehingga petugas dari perwakilan Perancis lebih banyak bekerja dan melaporkan hasil survei mereka

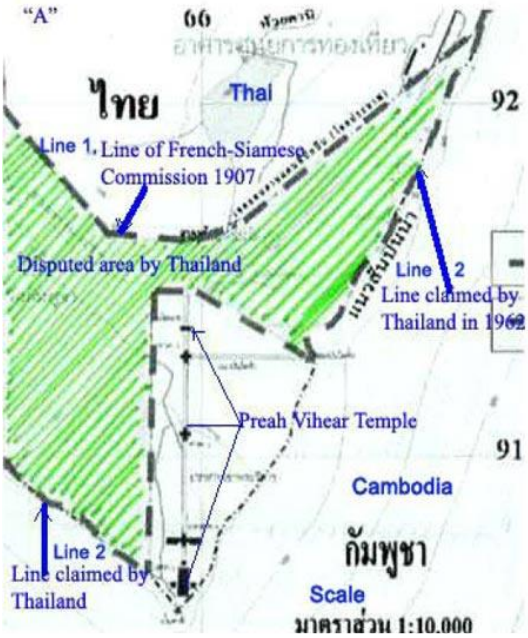
kepada komisi bersama. Akibatnya, sebelas peta dikomunikasikan ke pemerintah Siam sebelum akhir 1907. Salah satu peta menutupi bagian timur bagian dari Range Gunung Dangrek dan menunjukkan garis batas antara Siam dan Kamboja. Garis batas melenceng dari garis Daerah Aliran Sungai (DAS) yang diatur dalam Pasal 1 dari Perjanjian 1904. Penyimpangan membuat seluruh tanjung di Pegunungan Dangrek termasuk daerah kuil Preah Vihear masuk kedalam wilayah kedaulatan Kamboja (Alvarez, 2011, hal. 1035). Kemudian putusan ICJ keluar pada tahun 1962 yang menyatakan bahwa kuil Preah Vihear merupakan bagian atas kedaulatan Kamboja dan Thailand wajib menarik pasukannya dari wilayah tersebut (Dewi, 2013, hal. 3-4).

Konflik ini sempat meredam pasca putusan 1962 kedua Negara tidak pernah membahas lagi mengenai konflik perbatasan Preah Vihear. Namun, eskalasi konflik antara Thailand dan Kamboja terjadi lagi pasca diputuskannya kuil Preah Vihear sebagai warisan dunia milik Kamboja pada tahun 2008. Konflik yang kini timbul diperparah dengan adanya ketidak stabilan politik domestik Thailand. Gerakan nasionalis Thailand menggunakan isu Preah Vihear untuk menggulingkan Perdana Menteri Samak Sundarajev (Dewi, 2013, hal. 3-4).

Pada awalnya, pemerintah Thailand di bawah Perdana Menteri Samak Sundarajev menyatakan bahwa Thailand akan mendukung kuil Preah Vihear dalam daftar warisan dunia, dalam pernyataan yang dinyatakan itu bahwa persetujuan tersebut tidak termasuk dalam wilayah sengketa dengan kata lain tidak boleh mempengaruhi batas yang disengketakan. Kemudian, hal ini yang menyebabkan kemarahan gerakan nasionalis Thailand. Gerakan nasionalis

People Alliance For Democracy (PAD) berdemonstrasi di dekat kuil Preah Vihear dan menyebabkan situasi kacau di daerah perbatasan. Hal ini di respon oleh pemerintah Kamboja, oleh karena itu pemerintah Kamboja menutup perbatasan di sekitar Preah Vihear untuk orang-orang dari Thailand. Gerakan nasionalis berasumsi bahwa persetujuan yang diberikan oleh Samak karena adanya imbalan atas konsesi bisnis di Kamboja (Mackinnon, 2008). Disamping itu, hal ini juga dimanfaatkan oleh partai oposisi untuk menggulingkan pemerintahan Samak di Thailand. Partai oposisi Demokrat berkoalisi dengan gerakan PAD dalam penolakannya mengenai pendaftaran kuil Preah Vihear ke United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) (Tun, 2011, p. 23).

Gambar1. 1 Peta Klaim Thailand atas permasalahan wilayah sekitar kuil Preah Vihear



Sumber Gambar diambil dari, Kenneth T. So 'Cambodia Information Center', *PREAH VIHEAR: A KHMER HERITAGE,* 25 Juli 2008 < http://www.cambodia.org/Preah_Vihear/?history=A+Khmer+Heritage>

Wilayah yang disengketakan tersebut adalah wilayah disekitar kuil Preah Vihear yaitu tanah 4.6 kilometer persegi. Thailand dalam klaim yang

dilakukan terhadap tanah yang menjadi tuntutan tersebut berdasarkan pada intepretasi mengenai putusan ICJ di 1962 yang hanya terbatas pada kedaulatan atas wilayah kuil Preah Vihear, akan tetapi garis batas itu tidak memiliki status hukum dari keputusan yang telah dikeluarkan (Tun, 2011, pp. 22-24). Konflik yang telah usai kini memasuki era baru, yang diperebutkan adalah tanah yang berada di sekitar yang mendekati dengan wilayah perbatasan Thailand. Tanah ini yang dituntut oleh pihak Thailand atas kepemilikannya sedangkan putusan dari ICJ sudah jelas bahwa kuil Preah Vihear menjadi milik Kamboja.

Pada bulan April 2009, tentara kedua Negara saling tembak melintasi perbatasan yang disengketakan. Pada Februari 2011 setidaknya delapan orang tewas dalam beberapa hari pertempuran. Di bulan April, karena bentrokan yang meluas memaksa puluhan ribu orang untuk meninggalkan wilayah sekitar sengketa (BBC, 2017). Penduduk yang tinggal disekitar wilayah kuil terpaksa meninggalkan tempat tinggalnya padahal penduduk yang tinggal di daerah tersebut sebagian dari masyarakat kedua Negara yang berkonflik (Irewati, 2015, pp. 168-9).

Untuk menghentikan konflik tersebut maka proses penyelesaian sengketa pun dilakukan oleh kedua Negara. Beberapa negosiasi yang dilakukan pada tahun 2008 pertemuan antara Perdana Menteri Samak Sundarajev dan Perdana Menteri Hun Sen menghasilkan putusan berupa penarikan militer dari wilayah sengketa tetapi masih belum jelas kapan penarikan itu dilakukan (Raharjo S. N., 2013, hal. 116). Selain usaha Negosiasi untuk mencari solusi bagi konflik perbatasan antara Thailand dan Kamboja, usaha dengan melibatkan pihak ketika juga dilakukan

dengan melibatkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ICJ dan ASEAN. Berbeda dengan Kamboja, menurut Thailand proses penyelesaian dapat terselesaikan dengan baik apabila dengan metode negosiasi saja. Sementara Kamboja menginiginkan adanya pihak ketiga dalam capur tangannya untuk menyelesaikan konflik yang terjadi. Sebelum kasus ini ditangani oleh ASEAN, Kamboja dengan langkah sepihaknya melaporkan kasus ini ke pihak PBB namun PBB kembali merujuknya ke ASEAN (Irewati, 2015, hal. 170).

Pada tanggal 22 Februari 2011, Thailand dan Kamboja sebenarnya sudah berusaha untuk menghentikan konflik yang terjadi dengan melakukan pertemuan yang di fasilitasi ASEAN di Jakarta. Pada saat itu, kedua belah pihak sepakat untuk menerima tim pemantau dari Indonesia yang akan dikirim ke wilayah yang di sengketakan. Selain itu, pertemuan yang di fasilitasi ASEAN, kedua Negara sepakat untuk pertemuannya dalam Joint Border Commision *(*JBC) dengan melibatkan menteri pertahanan kedua Negara yang akan di selenggarakan pada April 2011 di Bogor 2011. Disamping itu, hal ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa wilayah tersebut, di sini juga ASEAN terlihat ingin memperkuat sistem institusi ASEAN agar lebih dipercaya oleh negara-negara lainnya sebagai institusi regional (ICJ, 2013, hal. 281). Hal ini menjadi tantangan bagi ASEAN sebagai organisasi internasional dalam menengahi anggotanya yang berkonflik serta signifikansi keberadaan dari organisasi ASEAN.

1.2 Rumusan Masalah

Mengapa Thailand memunculkan isu Preah Vihear kembali pada tahun 2008?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan bagaimana sengketa ini dapat terselesaikan dan langkah-langkah yang ditempuh oleh kedua Negara dalam menemukan solusi wilayah sekitar kuil Preah Vihear baik melalui bilateral atau multilateral.
2. Menganalisis mengenai munculnya isu perbatasan diiringi dengan kebangkitan kelompok nasionalis Thailand
3. Menganalisis alasan Kebijakan pemerintah Thailand dalam memunculkan kembali isu kuil Preah Vihear.

1.4 Signifikansi

Penelitian ini penting dilakukan karena masih banyak yang belum membahas secara rinci mengapa Thailand mengungkit kembali konflik perbatasan kuil Preah Vihear dengan teori atau konsep yang digunakan dalam mengkaji lebih dalam mengenai timbulnya kembali isu perbatasan antara Thailand dan Kamboja yang telah selesai oleh pihak ICJ di tahun 1962. Sebagain besar dari penelitian ini akan membahas mengenai pengaruh dalam proses pengambilan keputusan Thailand dalam isu perbatasan kuil Preah Vihear. Pengaruh dalam pengambilan keputusan meliputi domestik dan internasional yang dapat mempengaruhi kebijakan Thailand. Hal ini yang menjadikan penelitian ini layak untuk diteliti, dengan menggunakan teori *decision making* akan menganalisis lebih dalam mengenai kebijakan Thailand dalam memunculkan kembali isu Preah Vihear, melalui teori *decision making* pula akan dijelaskan aktor-aktor penting yang mempengaruhi kebijakan Thailand dalam isu perbatasan dengan Kamboja.

1.5 Cakupan Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam ranah kajian hubungan internasional, konflik yang terjadi kembali membahas mengenai perbatasan antara Thailand dan Kamboja. Konflik yang sempat meredam kini pada tahun 2008 memasuki era baru pasca putusan UNESCO menobatkan kuil Preah Vihear sebagai warisan dunia. Bahkan konflik ini muncul kembali karena dipicu oleh kepentingan politik dari beberapa partai di Thailand untuk menggulingkan serta menurunkan popularitas pemerintahan pada saat itu. Pada penelitian ini juga akan mencakup hingga faktor internasional yang membuat pemerintah Thailand memunculkan kembali isu kuil Preah Vihear di tahun 2008.

1.6 Kajian Pustaka

Teritorial atau wilayah suatu Negara merupakan salah satu syarat penting bagi keberadaan sebuah Negara. Morgenthau memandang bahwa teritorial adalah kekuatan nasional sebuah Negara (2010, hal. 123-125). Lalu kekuatan nasional Negara dibagi ke dalam dua katagori yaitu;

1. *Tangible Power* yaitu kekuatan suatu Negara yang akan diukur melalui luas wilayah, populasi openduduk dan sumber daya alam
2. *Intangible Power* yaitu kekuatan suatu Negara yang hanya akan dapat diukur kualitasnya seperti tingkat pendidikan dan resiko bencana alam.

Kekuatan Negara termasuk dalam bagian dari teritorial suatu Negara yang dapat dilihat keberadaanya sehingga termasuk dalam katagori tangible power. Faktor tangible inilah yang menjadikan alasan pertama mengapa Negara begitu *concern* dengan batas wilayahnya. Sedangkan faktor dari intangible

power digunakan untuk menggambarkan teritori atau wilayah sebagai identitas penduduk suatu Negara dan menyangkut hal-hal yang bersifat jati diri bangsa sebab seringkali konflik wilayah yang terjadi diakibatkan oleh alasan identitas. Kamboja dan Thailand mempunyai peta yang berbeda atas penggambaran batas-batas dari wilayahnya. Apabila dikaitkan dengan kekuatan nasional Negara dari *Intangible power,* kedua Negara masing-masing memiliki sejarah mengenai wilayah ini yang merupakan pernah menjadi bagian dari Thailand ketika masa kerajaan Siam dan Menurut Kamboja kuil tersebut dibangun oleh kerajaan Khamer. Tidak bisa dipungkiri dengan adanya *historis* tersebut membuat wilayah ini begitu penting bagi kedua Negara selain menambah luas wilayah kedua Negara serta nilai plusnya adalah ada sumber sejarah diwilayah tersebut.

Menurut Raharjo (2013, hal. 110-112) konflik yang terjadi antara Thailand dan Kamboja karena adanya perbedaan peta atas batas Negara yang dibuat oleh Thailand dan Kamboja. Garis perbatasan ini merupakan awal dari perjanjian yang dilakukan antara pemerintah kolonial Perancis yang pada saat itu menguasai Kamboja dengan kerajaan Siam atau yang sekarang sudah menjadi Negara Thailand. Pasca perang Franco dan Siam 1893 membuat wilayah Kamboja meluas hingga sisi kiri Sungai Mekong. Kedua Negara sepakat melakukan perjanjian batas-batas Negara pada tahun 1904 dan 1907. Kemudian dibentuklah komisi yang terdiri dari perwakilan kedua Negara yang bertugas untuk memetakan perbatasan. Namun, perwakilan dari Siam kurang memiliki kemampuan untuk melakukan pemetaan sehingga petugas dari Perancis lebih banyak bekerja dan melaporkan hasil survey yang dilakukan

bersama. Pada saat itu tidak ada yang keberatan atas peta annex I yang dihasilkan komisi bersama tersebut. Masalah mucul ketika Siam berubah menjadi Thailand pada tahun 1940 yang mengklaim bahwa terdapat kesalahan dalam pembuatan peta tersebut dimana kuil Preah Vihear seharusnya menjadi bagian dari wilayah Thailand. Ketika Kamboja meraih kemerdekaanya pada tahun 1953 dimanfaatkan oleh Thailand untuk menolak perjanjian Perancis dan Siam 1904-1907. Kuil Preah Vihear diokupasi oleh Thailand pada tahun 1954 dengan menpatkan tentara di area tersebut. Sedangkan langkah dari Kamboja untuk menghentikan okupasi tersebut pada 6 oktober 1959 mendaftarkan kasus ini ke Mahkamah Internasional. Berdasarkan pertimbangan bahwa peta Annex I sudah dikosnultasikan dan diterima oleh pemerintahan Siam dan tidak pernah ada keberatan yang duajukan, bahkan peta tersebut sudah dicetak oleh Thailand, maka pada 15 Juni 1962 ICJ menyatakan kuil Preah Vihear merupakan bagian dari kedaulatan Kamboja dan memerintahkan Thailand untuk menarik militernya di wilayah tersebut. Pasca putusan ICJ, ketegangan diplomatik dan militer menurun. Selama beberapa dekade setelahnya isu mengenai kuil Preah Vihear tidak terlalu diungkit oleh Kamboja dan Thailand.

Menurut Dewi (2013, hal. 6-8) mengenai konflik perbatasan antara Thailand dan Kamboja yang memasuki era baru di tahun 2008, setelah putusan UNESCO menetapkan kuil Preah Vihear menjadi warisan dunia milik Kamboja. Pemerintah Thailand tidak terima atas putusan tersebut sebab tanpa persetujuan dari Thailand untuk memutuskan Preah Vihear masuk kedalam daftar warisan dunia. Pemerintah Thailand meminta kepada UNESCO agar

proses warisan dunia harus didaftarkan oleh Kamboja dan Thailand. Kamboja tidak menginginkan kuil Preah vihear menjadi warisan dunia dari Thailand dan Kamboja sebab tidak ada pelanggaran kedaulatan Negaranya. Hal inilah yang memicu eskalasi konflik bagi kedua Negara dalam penulisannya ternyata Rosita Dewi menjelaskan faktor lain seperti adanya situasi politik domestik Thailand. Kelompok Nasionalis Thailand menggunakan isu Preah Vihear untuk menggulingkan Predana Menteri Samak Sundarajev. Akan tetapi dalam tulisan Rosita Dewi hanya sedikit menjelaskan situasi domestik Thailand.

Masih berkaitan mengenai konflik yang kembali muncul antara Thailand dan Kamboja menurut Kyaw Moe Tun (2011, pp. 27-28), konflik yang terjadi kini klaim atas wilayah yang berada di sekitar kuil Preah Vihear 4,6 kilometer persegi. Perselisihan perbatasan yang sedang berlangsung telah menyebabkan terjadinya pertarungan antara kedua militer tersebut, yang mengakibatkan korban manusia, pengungsian manusia, penghancuran harta benda dan kehidupan sehari-hari dari penduduk yang tinggal di sepanjang daerah perbatasan dan penutupan gerbang perbatasan. Penduduk yang tinggal di sekitar zona konflik segera dievakuasi. Penduduk tersebut merupakan warga dari kedua belah pihak. Bentrokan tersebut juga mengakibatkan kerusakan material pada kuil Preah Vihear. Didalam artikel ini juga menjelaskan, bahwa adanya faktor domestik dari kedua Negara yang mempengaruhi terhadap konflik Preah Vihear. Perdana menteri Hun Sen dengan partainya Cambodian People Party (CPP) dengan mendaftarkan kuil Preah Vihear sebagai warisan dunia merupakan salah satu penghargaan dalam pemerintahannya dan akan menguatkan partainya. Kemudian disisi Thailand dalam artikel ini akan

menambah infomasi untuk analisis peneliti, PAD menuduh pemerintah gagal mempertahankan wilayah nasional. Pada bulan Januari 2011, PAD menyelenggarakan demonstrasi besar yang berfokus pada isu Kuil Preah Vihear dan meminta pemerintah untuk membatalkan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kamboja mengenai batas wilayah yang ditanda tangani.

Menurut Irewati (2015, hal. 170-188), proses penyelesaian konflik antara kedua Negara ini melibatkan organisasi regional ASEAN. Oganisasi ASEAN sebagai pihak ketiga antara Thailand dan Kamboja. Peran ASEAN dalam keterlibatannya antara konflik Kamboja dan Thailand sangat dibutuhkan, selain sebagai pihak ketiga antara kedua Negara ASEAN dituntut untuk meredam konflik yang terjadi. Dalam forum ASEAN Foreign Ministers Meeting berhasil mempertemukan Thailand dan Kamboja. Dari pertemuan tersebut kedua Negara sepakat untuk menghadiri forum JBC yang dilakasanakan di Bogor pada April 2011. Hasil dari pertemuan ini adalah berupa pengiriman tim pemantau ke area sengketa. Hasil putusan tersebut disambut hangat oleh Perdana Menteri Kamboja Hun Sen, berbeda dengan Prawit Wongsuwun yaitu menteri pertahanan Thailand yang menyetakan tidak akan menghadiri JBC tersebut dan menolak adanya kehadiran tim pemantau dari Indonesia serta tidak menginginkan adanya campur tangan dari pihak ketiga. Maka dengan tindakan sepihaknya Kamboja melaporkan sengketa ini ke Mahkamah Internasional PBB akan tetapi, PBB merujuknya kembali ke ASEAN dan akhirnya putusan dari ASEAN disetujui oleh PBB untuk mengirim tim pematau di area berkonflik tersebut dan kedua Negara harus

mengikuti putusan tersebut. Tindakan berikutnya yang diambil oleh Kamboja adalah dengan meminta ulang atas intepretasi putusan ICJ tahun 1962 terhadap wilayah Preah Vihear.

Dalam tulisannya Kurniawan (2017, hal. 1121-1126) *Decision Making Theory* mampu menganalisis alasan Rusia menjadi pengamat Organisasi Konferensi Islam (OKI). Hal yang melatar belakangi Rusia menjadi pengamat OKI merupakan salah satu cara untuk memperbaiki citra Rusia di mata internasional dalam konflik Chechnya, Dagestan, dan berbagai kebijakan pemerintah Rusia yang cenderung mendiskriminasikan umat Muslim Rusia menghasilkan pandangan yang begitu buruk bagi Rusia. Upaya Rusia untuk memperbaiki citra buruknya di dunia Internasional, Rusia berusaha membangun pengaruhnya terutama di negara-negara yang dianggap sebagai potensi kekuatan baru di dunia Internasional. Dalam hal ini Rusia ingin memperkuat kerjasama dengan negara-negara anggota OKI yang didominasi oleh negara-negara Islam. Presiden Vladimir Putin sadar akan besarnya jumlah dari masyarakat Islam di Negaranya. Hal ini yang membuat berusaha untuk lebih melibatkan mereka dengan berbagai kegiatan yang ada di Rusia baik secara nasional maupun internasional. Sehingga umat Islam Rusia merasa memiliki peran penting. Putin menempuh sejumlah langkah dalam kebijakannya mengenai pro Islam di Rusia, diantaranya dengan melakukan dukungannya dalam pengembangan tempat ibadah, pendidikan Islam di Rusia, adanya pembentukanlembaga atau organisasi yang guna menaungi umat muslim di Rusia. Bahkan pemimpin Rusia Vladimir Putin memasukkan pejabat Muslim dalam kabinetnya yaitu Benjamin Popov diangkat sebagai

sebagai duta yang diutus pemerintah untuk tugas khusus ke berbagai Negara. Hal ini dilakukan tentunya untuk mendapatkan simpatik dari masyarakat Rusia yang kemudian kebijakan tersebut dapat dukungan penuh dari masyarakat. Melalui, penjelasan mengenai penerapan dari teori *decision making* dalam kasus Rusia, peneliti akan menjadikan tulisan ini sebagai acuan yang mana cara untuk mengaplikasikan teori *decision making* pada kasus wilayah sekitar Preah Vihear.

1.7 Landasan Teori/Konsep atau Pendekatan

Decision Making Theory dari Richard Snyder, H. W Bruck dan Burton (Snyder, 1962, hal. 203) memberikan penggambaran mengenai faktor internal dan eksternal yang menjadi penyebab diambilnya kebijakan luar negeri oleh para pembuat keputusan. Analisisnya terletak pada sejauh mana sebuah kebijakan luar negeri yang dikeluarkan dipengaruhi oleh faktor internal atau eksternal dari Negara. Pembentukan pengambilan keputusan akan dipengaruhi oleh berbagai factor, yaitu faktor internal adalah cara masyarakat diorganisasikan dan berfungsi, seperti politik domestik, opini public, sikap publik, posisi geografis dan kekuatan nasional. Sementara faktor eksternal yang meliputi dari adanya situasi dan kondisi di luar Negara seperti aksi dan reaksi dari Negara lain.

Rational Choice Model

Kondisi domestik Negara dalam pengambilan keputusan akan mempengaruhi kebijakan luar Negeri suatu Negara. Pengambilan keputusan adalah proses memilih prinsip, pendekatan, metode implementasi untuk

mencapai tujuan di mana pengaruh dari partai politik, pemimpin suatu Negara melakukan kegiatan untuk tujuan dan arahan kegiatan. Salah satu model utamanya adalah model pilihan rasional yang didasarkan pada pelaku individu atau kelompok dalam proses pengambilan keputusan bertindak rasional dan berusaha mencapai tujuan mereka sendiri dalam persaingan satu sama lain, dengan tujuan untuk memenangkan jabatan, jadi mereka mungkin mendukung isu-isu bukan demi masalah itu sendiri, tapi untuk memenangkan suara (Xing, 2015, hal. 42). Artinya, partai politik cenderung mengejar kebijakan yang menjamin jumlah suara maksimal. Para pihak akan responsif terhadap perubahan opini publik, dan mungkin enggan untuk berkomitmen terlalu kuat terhadap kebijakan tertentu, jika terjadi perubahan opini public (Derouen, 2010, p. 62).

Selaras dengan Ahmed Aref Kafarneh (Kafarneh, 2013, hal. 62-70), yang dimaksud dari Pengambilan Keputusan merupakan aspek penting dari tanggung jawab pemerintah. Faktor internal seperti politik domestik mempengaruhi diambilnya kebijakan karena dalam sistem politik yang memungkinkan banyak menyoroti peran partai politik dalam proses pengambilan keputusan, apakah partai-partai ini berpartisipasi dalam pemerintahan dan dengan tingkat pengaruh yang berbeda. Pengambil keputusan dipengaruhi oleh program partai tersebut dan prinsip-prinsipnya seperti, Negara yang hanya memiliki satu partai seringkali berada dalam kebijakan luar negeri yang sangat kuat dan memainkan peran penting dalam pembuatan kebijakan luar negeri.

Apabila pola internal menunjukkan hubungan kekuatan antara pemerintah dan masyarakat dalam sistem domestik, maka berbeda dengan Negara dalam sistem internasional. Pada level analisis domestik adanya kelompok masyarakat menekan pemerintah sehingga mempengaruhi kebijakan yang akan diambil sedangkan level internasional adanya Negara lain hingga organisasi internasional yang dapat menekan Negara pada tingkat analisis internasional. Artinya bahwa kebijakan luar negri suatu Negara bisa mempengaruhi Negara lain di wilayah regional maupun internasional. Pertimbangan mengenai tekanan dari organisasi internasional lebih mungkin terjadi, ketika organisasi semacam itu menekan Negara A untuk mengambil posisi tertentu dengan menerapkan norma dan peraturan organisasi yang telah dibuat, maka kemungkinan ini untuk mempengaruhi preferensi Negara A (Kamps, 2005, p. 23).

Melalui teori *decision making* akan memberikan penjelasan mengenai pengambilan kebijakan luar negeri Thailand dalam permasalahan perbatasan antara Thailand dan Kamboja. Seperti yang telah dijelaskan sedikit pada latar belakang bahwa kondisi domestik politik Thailand yang tidak stabil dengan adanya kebangkitan dari gerakan Nasionalis dan persaingan politik, lalu adanya kebijakan dari Kamboja dengan mendaftarkan Preah Vihear sebagai warisan dunia membuat Thailand mengambil keputusan dengan memunculkan kembali isu Preah Vihear serta penempatan militernya di perbatasan karena khawatir dari pendaftaran tersebut akan mempengaruhi garis batas Negara.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Metode peneliatian yang digunakan untuk mengkaji mengenai konflik yang terjadi antara Thailand dan Kamboja adalah dengan menggunakan metode dari penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan serta menganlisa persepsi, pemikiran seseorang secara individu maupun kelompok. Melalui beberapa deskripsi yang digunakan tujuannya untuk menemukan penjelasan yang akan mngarahkan pada kesimpulan (Hamdi, 2014, hal. 18). Hal ini mengandung pengertian bahwa penelitian kualitatif mempelajari sesuatu serta berusaha untuk membuat deskripsi yang sesuai dengan yang dipersepsikan oleh subyek. Metode kualitatif digunakan dalam penelitian ini guna memahami dari situasi sosial secara mendalam, menemukan pola, hipotesis hingga teori (Sugiyono, 2009, hal. 15-20).

1.8.2 Subjek Penelitian

Konflik yang terjadi antara kedua Negara ASEAN yaitu Thailand dan Kamboja mengenai wilayah sekitar kuil Preah Vihear yang menjadi isu internasional. Masing-masing dari pihak Thailand dan Kamboja menggunakan penggambaran peta perbatasan yang berbeda. Pada sisi Thailand, munculnya isu ini dikarenakan adanya domestik politik Thailand yang tidak stabil. Proses penyelesaiannya memerlukan bantuan pihak ketiga seperti organisasi ASEAN dan ICJ.

1.8.3 Alat Pengumpul Data

Teknik pengumpulan data pada tulisan ini akan menggunakan library research atau kepustakaan yang dapat digunakan untuk membedakan hal yang telah dilakukan dan hal lain yang perlu diulas kembali atau ditambahkan pada penelitian selanjutnya (Daymon, 2007, hal. 55-60).

1.8.4 Proses Penelitian

Dalam penelitian ini proses yang akan dilakukan adalah proses analisis, dari sumber data yang didapatkan melalui teknik library search akan diolah kemudian dianalisis untuk melihat permasalahan mengenai munculnya kembali konflik perbatasan antara Kamboja dan Thailand. Melalui proses analisis tersebut akan ditemukan berupa kesimpulan dari rumusan masalah yang akan penulis teliti